

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.909.391.870,00 atau mencapai 318,56% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.855.040.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp954.270.749.318,00 atau mencapai 90,86% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.050.297.366.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp174.381.360.546,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.228.351.681,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp168.471.406.430,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp125.239.465,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.556.362.970,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp-223.314.306,00 dan Rp174.158.046.240,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.117.564.874,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.075.245.263.629,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-1.072.127.698.755,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus

Rp6.432.992.400,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-1.065.694.706.355,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp284.340.244.782,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-1.065.694.706.355,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-5.118.595.400,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp960.484.981.763,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp175.255.325.363,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016			31 Desember 2015
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1.855.040.000,00	5.909.391.870,00	319	3.606.847.350,00
Jumlah Pendapatan		1.855.040.000,00	5.909.391.870,00	319	3.606.847.350,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	26.158.169.000,00	24.415.724.360,00	93,34	22.882.929.757,00
Belanja Barang	B.2.2	1.019.442.746.000,00	925.472.767.048,00	90,78	958.903.255.651,00
Jumlah Belanja Operasi		1.045.600.915.000,00	949.888.491.408,00	90,85	981.786.185.408,00
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	2.943.852.000,00	2.644.207.150,00	89,82	1.577.074.560,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	788.999.000,00	782.366.000,00	99,16	4.771.147.100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.5	395.000.000,00	393.200.000,00	99,54	138.900.000,00

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

Uraian	Catatan	31 Desember 2016			31 Desember 2015
Belanja Modal Lainnya	B.2.6	568.600.000,00	562.484.760,00	98,93	256.628.000,00
Jumlah Belanja Modal		4.696.451.000,00	4.382.257.910,00	93,31	6.743.749.660,00
Jumlah Belanja		1.050.297.366.000,00	954.270.749.318,00	90,86	988.529.935.068,00

Jakarta, 21 April 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Spudnik Sujono K, MM
NIP. 19580206 198503 1 001

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	143.314.306,00	1.037.132.877,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	80.018.145,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3	1.717.455.284,00	461.502.936,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.4	-843.187.765,00	-461.477.936,00
Persediaan	C.1.5	2.130.751.711,00	110.274.431.658,00
Jumlah Aset Lancar		3.228.351.681,00	111.311.589.535,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	48.165.030.000,00	48.165.030.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	227.923.134.125,00	193.618.853.826,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	73.330.604.000,00	60.048.503.807,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	38.837.411.173,00	39.838.824.256,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	3.412.909.607,00	3.416.583.607,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	49.170.000,00	49.170.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.7	-199.155.094.109,00	-155.110.286.189,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.7	-13.022.603.556,00	-7.492.154.395,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.7	-11.069.154.810,00	-9.774.692.349,00
Jumlah Aset Tetap		168.701.631.255,00	172.759.832.563,00
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	125.868.809,00	0,00

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	-629.344,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		125.239.465,00	0,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	1.104.733.359,00	661.048.939,00
Aset Lain-lain	C.4.2	16.110.284.528,00	4.758.979.828,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.4.3	-14.179.877.808,00	-4.114.073.206,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	-478.777.109,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		2.556.362.970,00	1.305.955.561,00
Jumlah Aset		174.381.360.546,00	285.377.377.659,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	80.000.000,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	143.314.306,00	1.037.132.877,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		223.314.306,00	1.037.132.877,00
Jumlah Kewajiban		223.314.306,00	1.037.132.877,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.7.1	174.158.046.240,00	284.340.244.782,00
Jumlah Ekuitas		174.158.046.240,00	284.340.244.782,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		174.381.360.546,00	285.377.377.659,00

Jakarta, 21 April 2017
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Spudnik Sujono K, MM
 NIP. 19580206 198503 1 001

III. LAPORAN OPERASIONAL

**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	3.117.564.874,00	3.039.423.708,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.116.905.014,00	3.039.423.708,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	24.415.724.360,00	22.882.929.757,00
Beban Persediaan	D.3	11.458.707.042,00	20.935.051.096,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	112.417.287.369,00	147.567.655.205,00
Beban Pemeliharaan	D.5	4.249.848.809,00	4.416.888.966,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	140.937.288.858,00	144.128.811.685,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	0,00	2.061.530.941,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	766.967.783.639,00	568.089.343.861,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	14.352.470.415,00	17.142.384.305,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	446.153.137,00	229.719.040,00
JUMLAH BEBAN		1.075.245.263.629,00	927.454.314.856,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-1.072.127.698.755,00	-924.414.891.148,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	0,00	4.000.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	189.219.729,00	1.828.600.219,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	9.483.302.894,00	783.333.278,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	2.861.090.765,00	0,00

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		6.432.992.400,00	-1.041.266.941,00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-1.065.694.706.355,00	-925.456.158.089,00

Jakarta, 21 April 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Spudnik Sujono K, MM
NIP. 19580206 198503 1 001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
EKUITAS AWAL	E.1	284.340.244.782,00	245.633.162.512,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-1.065.694.706.355,00	-925.456.158.089,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Lain-lain	E.4.1	-54.690.045,00	-18.223.098.381,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2	-5.163.988.219,00	25.950.600,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.3	81.610.500,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.4	0,00	-1.805.215.090,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	960.649.575.577,00	984.165.603.230,00
EKUITAS AKHIR		174.158.046.240,00	284.340.244.782,00

Jakarta, 21 April 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Spudnik Sujono K, MM
NIP. 19580206 198503 1 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Hortikultura

Direktorat Jenderal Hortikulturadidirikan sebagai salah satu upaya pemerintah antara lain untuk :

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
- b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;
- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha
- f. memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional;
- g. meningkatkan sumber devisa negara;
- h. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Entitas berkedudukan di Jalan AUP No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Direktorat Jenderal Hortikulturamempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan kebijakan, regulasi teknis, dan administrasi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya hortikultura.Melalui peran tersebut diharapkan tujuan dari penyelenggaraan pembangunan hortikultura dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan baik dari sasaran produksi, produktivitas, mutu serta daya saing yang berkesinambungan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas,Direktorat Jenderal Hortikulturaberkomitmen dengan visi **“Terwujudnya Industri Hortikultura Ramah Lingkungan yang Kuat dan Mandiri untuk Kesejahteraan Petani”**

Untuk merealisasikan visi Direktorat Jenderal Hortikultura,akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan hortikultura yang ramah lingkungan

2. Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pasca panen yang baik dengan pendekatan ramah lingkungan
 3. Memperkuat Sistem dan Industri Perbenihan Hortikultura
 4. Memperkuat Sistem Perlindungan Hortikultura, serta mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim
 5. Mengembangkan pelaku usaha dan kelembagaan hortikultura yang profesional
 6. Menerapkan tata kelola pengembangan hortikultura yang bersih, ~~dan~~ transparan dan profesional.
 7. Mendukung pengembangan bio – industri hortikultura berkelanjutan
- Mendorong kerjasama dan kemitraan usaha serta perdagangan komoditas hortikultura yang transparan, jujur dan berkeadilan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Hortikultura yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura adalah **185 entitas** Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Satker	URAIAN SATKER	JENIS KEWENGAN				
			KP	KD	DK	TP	TP PROV.
1	019031	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA			✓		
2	625875	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	✓				
3	029027	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT			✓		
4	029031	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB BOGOR				✓	
5	029033	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB SUKABUMI				✓	
6	029036	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB CIANJUR				✓	
7	029042	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB PURWAKARTA				✓	
8	029047	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB BANDUNG				✓	
9	029050	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB SUMEDANG				✓	
10	029053	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT				✓	
11	029055	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA				✓	
12	029059	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB CIAMIS				✓	
13	029063	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN KAB. CIREBON				✓	
14	029067	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB KUNINGAN				✓	
15	029073	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka				✓	
16	029075	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. BANDUNG BARAT				✓	
17	029160	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT					✓
18	029460	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB INDRAMAYU				✓	
19	030453	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GROBOGAN				✓	
20	030649	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG				✓	

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

No	Kode Satker	URAIAN SATKER	JENIS KEWANGAN				
			KP	KD	DK	TP	TP PROV.
21	030950	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. PATI				✓	
22	031343	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN REMBANG				✓	
23	031440	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA				✓	
24	031751	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PURBALINGGA				✓	
25	032055	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEMANGGUNG				✓	
26	032357	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB. KEBUMEN				✓	
27	039012	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI JAWA TENGAH			✓		
28	039042	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SEMARANG				✓	
29	039054	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BREBES				✓	
30	039058	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB. PEMALANG				✓	
31	039069	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. MAGELANG				✓	
32	039077	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOYOLALI				✓	
33	39079	DINAS PERTANIAN KAB. SRAGEN				✓	
34	039082	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. KARANGANYAR				✓	
35	039126	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PURWOREJO				✓	
36	39152	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI JAWA TENGAH					✓
37	039444	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DEMAK				✓	
38	039471	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN & KEHUTANAN KABUPATEN TEGAL				✓	
39	039549	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANJARNEGARA				✓	
40	039574	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN WONOSOBO				✓	
41	039668	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN WONOGIRI				✓	

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

No	Kode Satker	URAIAN SATKER	JENIS KEWENGAN				
			KP	KD	DK	TP	TP PROV.
42	419018	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUDUS				✓	
43	049025	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			✓		
44	049038	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL				✓	
45	049040	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SLEMAN				✓	
46	049046	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KULONPROGO				✓	
47	049162	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. GUNUNG KIDUL				✓	
48	052956	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMONGAN				✓	
49	055932	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOJONEGORO				✓	
50	059000	DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR			✓		
51	059046	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN SUMENEP				✓	
52	059051	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BONDOWOSO				✓	
53	059056	DINAS KEHUTANAN, PERTANIAN DAN URUSAN KETAHANAN PANGAN KAB. BANYUWANGI				✓	
54	059059	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KAB MALANG				✓	
55	059063	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN PASURUAN				✓	
56	059066	DINAS PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO				✓	
57	059068	DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG				✓	
58	059072	DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEDIRI				✓	
59	059087	DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAGETAN				✓	
60	059096	DINAS PERTANIAN KABUPATEN TUBAN				✓	
61	059128	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN JEMBER				✓	
62	059139	DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK				✓	
63	059453	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN GRESIK				✓	
64	59931	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PACITAN				✓	

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

No	Kode Satker	URAIAN SATKER	JENIS KEWANGAN				
			KP	KD	DK	TP	TP PROV.
65	069067	DINAS PERTANIAN TP, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB BENER MERIAH				✓	
66	69077	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP. ACEH			✓		
67	69133	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP. ACEH					✓
68	079025	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA			✓		
69	079041	DINAS PERTANIAN KAB SIMALUNGUN				✓	
70	079047	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. TAPANULI SELATAN				✓	
71	079125	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA					✓
72	079348	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARO				✓	
73	089009	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT			✓		
74	089043	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam				✓	
75	089057	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN				✓	
76	089131	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT					✓
77	089285	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB LIMAPULUH KOTA				✓	
78	089295	Dinas Pertanian Kabupaten Solok				✓	
79	099033	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU			✓		
80	099043	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR				✓	
81	099315	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU					✓
82	100637	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MERANGIN				✓	
83	109005	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI			✓		
84	109049	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN KERINCI				✓	
85	109905	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI				✓	
86	110845	DINAS PERTANIAN KAB. OGAN KOMERING ILIR				✓	
87	110944	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUASIN				✓	
88	119000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN			✓		

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

No	Kode Satker	URAIAN SATKER	JENIS KEWANGAN				
			KP	KD	DK	TP	TP PROV.
89	119047	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU				✓	
90	119130	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN					✓
91	129000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. LAMPUNG			✓		
92	129039	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN				✓	
93	129041	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH				✓	
94	129045	DINAS PERTANIAN KAB. LAMPUNG BARAT				✓	
95	129051	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. TANGGAMUS				✓	
96	129113	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. LAMPUNG					✓
97	129285	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (03)				✓	
98	139030	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT			✓		
99	139126	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT					✓
100	139331	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. KUBU RAYA				✓	
101	149000	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			✓		
102	149115	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					✓
103	159000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN			✓		
104	159046	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TAPIN				✓	
105	159050	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BARITO KUALA				✓	
106	159108	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN					✓
107	419019	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN				✓	
108	160942	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PENAJAM PASER UTARA				✓	
109	169025	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR			✓		
110	169041	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER				✓	

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

No	Kode Satker	URAIAN SATKER	JENIS KEWENGAN				
			KP	KD	DK	TP	TP PROV.
111	169113	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR				✓	
112	179021	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA			✓		
113	179104	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA					✓
114	179221	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MINAHASA				✓	
115	189016	DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH			✓		
116	189224	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN DONGGALA				✓	
117	189264	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN KOTA PALU				✓	
118	189916	DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH					✓
119	190140	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PINRANG				✓	
120	191336	DINAS PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO				✓	
121	192135	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ENREKANG				✓	
122	199026	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN			✓		
123	199043	DINAS PERTANIAN KABUPATEN GOWA				✓	
124	199092	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. BANTAENG				✓	
125	419020	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BONE				✓	
126	419021	DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAROS				✓	
127	419022	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SINJAI				✓	
128	419023	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TAKALAR				✓	
129	200544	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KONAWE SELATAN				✓	
130	209065	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA			✓		
131	209108	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA					✓
132	210168	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. MALUKU TENGAH				✓	
133	219000	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU			✓		
134	219091	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU					✓

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

No	Kode Satker	URAIAN SATKER	JENIS KEWENGAN				
			KP	KD	DK	TP	TP PROV.
135	229027	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI			✓		
136	229034	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BULELENG				✓	
137	229046	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERHUTANAN KAB BANGLI				✓	
138	229049	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KABUPATEN TABANAN				✓	
139	229100	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI					✓
140	230453	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BIMA				✓	
141	230576	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA				✓	
142	235158	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MATARAM				✓	
143	239009	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROV NUSA TENGGARA BARAT			✓		
144	239037	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LOMBOK BARAT				✓	
145	239127	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROV NUSA TENGGARA BARAT					✓
146	239253	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR (04)				✓	
147	240171	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUPANG				✓	
148	241436	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB ROTE NDAO				✓	
149	241542	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT				✓	
150	249030	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			✓		
151	249159	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR					✓
152	419024	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MANGGARAI				✓	
153	250253	DINAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR				✓	
154	250769	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MERAUKE				✓	
155	259018	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA			✓		
156	259050	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KAB NABIRE				✓	

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

No	Kode Satker	URAIAN SATKER	JENIS KEWANGAN				
			KP	KD	DK	TP	TP PROV.
157	259098	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI PAPUA					✓
158	269000	DINAS PERTANIAN PROPINSI BENGKULU			✓		
159	269057	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB KEPAHIANG				✓	
160	269097	DINAS PERTANIAN PROPINSI BENGKULU					✓
161	280151	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA					✓
162	285320	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN				✓	
163	289034	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA			✓		
164	299005	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN			✓		
165	299044	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PANDEGLANG				✓	
166	299381	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN					✓
167	299470	DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK (04)				✓	
168	309032	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			✓		
169	309901	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					✓
170	319002	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI GORONTALO			✓		
171	319089	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI GORONTALO					✓
172	419025	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN POHUWATU				✓	
173	419026	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GORONTALO				✓	
174	320088	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU					✓
175	329026	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU			✓		
176	330910	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TAMBRAUW				✓	
177	339156	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat			✓		
178	339226	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI PAPUA BARAT					✓
179	340056	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT			✓		

No	Kode Satker	URAIAN SATKER	JENIS KEWENGAN				
			KP	KD	DK	TP	TP PROV.
180	340118	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAJENE				✓	
181	340142	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT					✓
182	340229	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAMUJU				✓	
183	169045	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN				✓	
184	169051	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NUNUKAN				✓	
185	350044	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA			✓		
JUMLAH			1	0	34	123	27

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Hortikultura menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut:

(a) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK

90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR} dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Maluku Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	1.677.790.000,00	1.677.790.000,00
Pendapatan Jasa	177.250.000,00	177.250.000,00
Jumlah Pendapatan	1.855.040.000,00	1.855.040.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	26.158.169.000,00	26.158.169.000,00
Belanja Barang	1.212.378.858.000,00	1.019.442.746.000,00
Belanja Modal	2.969.279.000,00	4.696.451.000,00
Jumlah Belanja	1.241.506.306.000,00	1.050.297.366.000,00

B.1 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.793.947.425,00 atau mencapai 312,34% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.855.040.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			

Uraian	2016		
	Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	1.677.790.000,00	2.105.688.875,00	125,50
Pendapatan Jasa	177.250.000,00	220.677.313,00	124,50
Pendapatan Bunga	0,00	5.400.000,00	0,00
Pendapatan luran dan Denda	0,00	785.718.556,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	2.791.907.126,00	0,00
Jumlah	1.855.040.000,00	5.909.391.870,00	318,56

Realisasi Pendapatan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 60,64% dibandingkan TA 2015. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	2.105.688.875,00	2.248.165.365,00	-6,34
Pendapatan Jasa	220.677.313,00	358.077.507,00	-38,37
Pendapatan Bunga	5.400.000,00	54.217,00	9.859,98
Pendapatan luran dan Denda	785.718.556,00	401.836.496,00	95,53
Pendapatan Lain-lain	2.791.907.126,00	598.713.765,00	366,32
Jumlah	5.909.391.870,00	3.606.847.350,00	63,84

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar Rp954.270.749.318,00 atau 90,86% dari anggaran belanja sebesar Rp1.050.297.366.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016

Uraian	2016			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		26.158.169.000,00	24.424.775.168,00	93,37
Belanja Barang		1.019.442.746.000,00	925.668.342.396,00	90,80
Belanja Modal		4.696.451.000,00	4.382.257.910,00	93,31
Total Belanja Kotor		1.050.297.366.000,00	954.475.375.474,00	90,88
Pengembalian Belanja			-204.626.156,00	0,00
Total Belanja		1.050.297.366.000,00	954.270.749.318,00	90,86

Dibandingkan dengan Tahun 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar -3,47% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31	Realisasi 31	.%
	Desember 2016	Desember 2015	
Belanja Pegawai	24.415.724.360,00	22.882.929.757,00	6,70
Belanja Barang	925.472.767.048,00	958.903.255.651,00	-3,49
Belanja Modal	4.382.257.910,00	6.743.749.660,00	-35,02
Total Belanja	954.270.749.318,00	988.529.935.068,00	-3,47

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp24.415.724.360,00 dan Rp22.882.929.757,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,70% dari TA 2015.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	24.424.775.168,00	22.885.227.818,00	6,73
Jumlah Belanja Kotor	24.424.775.168,00	22.885.227.818,00	6,73
Pengembalian Belanja Pegawai	-9.050.808,00	-2.298.061,00	293,85
Jumlah Belanja	24.415.724.360,00	22.882.929.757,00	6,70

Tabel 10
Rinci Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA.2015 dan TA.2016

AKUN	URAIAN AKUN	TA 2015		TA 2016	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2				
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	20.151.989.000	16.333.761.580	18.251.833.000	18.157.602.400
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	544.000	433.802	285.000	243.303
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.383.887.000	1.237.952.904	1.361.797.000	1.259.915.640
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	369.653.000	350.931.538	393.442.000	362.421.678
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.154.380.000	1.074.705.000	1.100.820.000	985.410.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	195.810.000	173.225.000	185.870.000	172.255.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	710.169.000	428.033.574	278.598.000	268.200.427
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.031.637.000	987.540.720	1.053.808.000	971.586.720
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.000.000.000	1.621.502.000	2.045.344.000	1.568.260.000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	300.000.000	38.651.700	100.000.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	679.314.000	638.490.000	785.153.000	678.880.000
512211	Belanja Uang Lembur	4.081.584.000		-	
512412	Belanja Pegawai Transito	951.227.000		601.219.000	
	TOTAL	33.010.194.000	22.885.227.818	26.158.169.000	24.424.775.168

Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai di tahun 2016 karena adanya pegawai pindahan sebanyak 28 orang. Di Tahun 2016 ada pengembalian senilai Rp. 9.050.808, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian Gaji Bulan Februari 2016 An. Soesilo sebesar Rp. 8.672.100
- Pengembalian Gaji Tunjangan Umum An. Ernawati dan Lilik sebesar Rp.375.000

- c. Pengembalian Di akun Pembulatan yg berasal dari Kekurangan Gaji Pengabdian Tahun 2016 sebesar Rp.3.708

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp925.472.767.048,00 dan Rp958.903.255.651,00.

Realisasi belanja barang TA 2016 mengalami penurunan sebesar -3,49% dari TA 2015.

Tabel 11

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	21.093.697.566,00	19.187.612.434,00	9,93
Belanja Barang Non Operasional	70.992.825.449,00	110.885.090.534,00	-35,98
Belanja Barang Persediaan	11.386.244.264,00	19.582.357.750,00	-41,86
Belanja Jasa	20.414.784.021,00	19.086.492.598,00	6,96
Belanja Pemeliharaan	3.424.833.196,00	3.862.790.346,00	-11,34
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	140.702.357.687,00	143.504.735.073,00	-1,95
Belanja Perjalanan Luar Negeri	237.510.171,00	649.002.612,00	-63,40
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	649.124.088.011,00	633.758.047.655,00	2,43
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	2.151.461.831,00	1.797.532.687,00	19,69

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	6.140.540.200,00	6.751.686.375,00	-9,05
Jumlah Belanja Kotor	925.668.342.396,00	959.065.348.064,00	-3,48
Pengembalian Belanja Barang	-195.575.348,00	-162.092.413,00	20,66
Jumlah Belanja	925.472.767.048,00	958.903.255.651,00	-3,49

B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.382.257.910,00 dan Rp6.743.749.660,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar -35,02% dibandingkan TA 2015.

Tabel 12
Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.644.207.150,00	1.577.074.560,00	67,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	782.366.000,00	4.771.147.100,00	-83,60
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	393.200.000,00	138.900.000,00	183,08
Belanja Modal Lainnya	562.484.760,00	256.628.000,00	119,18
Jumlah Belanja Kotor	4.382.257.910,00	6.743.749.660,00	-35,02
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.382.257.910,00	6.743.749.660,00	-35,02

1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.644.207.150,00 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.577.074.560,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 59,62% dibandingkan TA 2015.

Tabel 13
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.644.207.150,00	1.577.074.560,00	67,67
Jumlah Belanja Kotor	2.644.207.150,00	1.577.074.560,00	67,67
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2.644.207.150,00	1.577.074.560,00	67,67

Tabel 14
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2016

No	Kegiatan	Bentuk Pengadaan	Rp
1	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Roll O Pact (Manual Mobile File)	137,500,000
2	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Instalasi CCTV	78,105,000
3	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Bagian Perencanaan)	18,532,000
4	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (External Hardisk - RIPH)	9,796,000
5	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Printer, Laptop, LCD Projector mendukung kegiatan Flori	101,999,400
6	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Pengolah Data dan Perangkat Komunikasi Untuk Mendukung Pelaporan Monev, Pembangunan Hortikultura dan RIPH	159,292,000
7	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Mesin Absensi Handkey II	164,400,000
8	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	80,088,000
9	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204,452,000
10	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Printer, Notebook, Scanner, Desktop All in One)	84,022,000
11	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Sarana Penunjang Kegiatan STO berupa Apple Iphone 6 Plus 64 GB)	290,660,000
12	1771. Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	Pengadaan Peralatan Audio Ruang Rapat, Kulkas, TV, Dispenser Water dan Hand Dryer	100,600,000
13	1772. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Pengadaan Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Camera, Infocus, Laptop ASUS)	23,305,000
14	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pemasangan Pipa Air Bersih dan Pemasangan Instalasi Pipa Hydrant Samping Kanan Gedung	98,410,000
15	1772. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Pengadaan barang belanja dan peralatan mesin dalam rangka penyediaan dan penggunaan benih hortikultura bermutu	14,799,000
16	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Printer dalam rangka mendukung tata naskah dinas elektronik	18,954,000
17	5886. Peningkatan Produksi Buah & Florikultura	Pekerjaan Pengadaan alat pengolah data mini, PC dan Printer mendukung kegiatan jeruk, pohon dan perdu	148,913,000
18	1772. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Pengadaan barang belanja modal peralatan dan mesin dalam rangka penyediaan dan penggunaan benih Hortikultura	44,962,500
19	1772. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Pengadaan alat dokumentasi penyebaran varietas Hortikultura	5,163,750
20	5887. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Fasilitas Sarana dan Prasarana Produk Hortikultura	124,260,000

No	Kegiatan	Bentuk Pengadaan	Rp
21	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Laptop tambahan dalam rangka laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Hortikultura	99,875,000
22	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Laptop, printer dan hardisk external dalam rangka penataan dan pengelolaan kerjasama pengembangan Hortikultura	73,025,000
23	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dalam rangka penataan dan pengelolaan kerjasama pengembangan Hortikultura	44,265,000
24	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan hardisk external dan PC dalam rangka penataan dan pengelolaan program pengembangan Hortikultura	29,153,000
25	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan printer dan laptop dalam rangka sarana pendukung subbag Anggaran	41,631,000
26	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Scanner, Printer, dan hardisk external dalam rangka sarana pendukung subbag Anggaran	29,003,000
27	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Laptop dan Printer dalam rangka penataan dan pengelolaan program pengembangan Hortikultura	80,730,000
28	5887. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Pengadaan Showcase pendukung Horti Mart	139,000,000
29	1774. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Kamera dalam rangka penataan dan pengelolaan kerjasama pengembangan Hortikultura	7,871,500
30	1772. Pengembangan Sistem Perbenihan Horikultura	Pengadaan Printer dalam rangka belanja modal peralatan dan mesin	19,440,000
31	1771. Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	Pengadaan AC	16,000,000
32	5887. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Pengadaan Etalase Pendukung Horti Mart	3,000,000
33	5887. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Pengadaan Timbangan digital kapasitas 150 Kg, 30Kg, CCTV, Komputer dan Alat Hitung Kasir, Trolley, Rak dan Peralatan Display, Mesin Wrapping mendukung Horti Mart	153,000,000
TOTAL			2,644,207,150

2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31Desember 2016 sebesar Rp 782.366.000,00 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp4.771.147.100,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 mengalami penurunan sebesar - 16,40% dibandingkan TA 2015.

Tabel 15
Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	782.366.000,00	4.771.147.100,00	-16,40
Jumlah Belanja Kotor	782.366.000,00	4.771.147.100,00	-16,40
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	782.366.000,00	4.771.147.100,00	-16,40

Tabel 16
Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2016

No	Kegiatan	Bentuk Pengadaan	Rp
1	1774.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Renovasi Infrastruktur Jalan DII	199,351,000
2	1774.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pembuatan Interior Ruang Rapat	199,340,000
3	1771. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	Renovasi Ruang Rapat	184,500,000
4	1774.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Saluran Pembuangan Ex Litbang	199,175,000
	TOTAL		782,366,000

3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 393.200.000,00 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp138.900.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 183.08% dibandingkan TA 2015.

Tabel 17
Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	393,200,000.00	138.900.000,00	183.08
Jumlah Belanja Kotor	393,200,000.00	138.900.000,00	183.08
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	393,200,000.00	138.900.000,00	183.08

Tabel 18
Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2016

No	Kegiatan	Bentuk Pengadaan	Rp
1	1774.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Revitalisasi Backbone Serat Optik Lingkup Ditjen Hortikultura	179.500.000
2	1774.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Penyempurnaan Jaringan Internet Hortikultura	194.000.000
3	5887.Pengolahan dan pemasaran hasil Hortikultura	Pengadaan pembuatan website Pascapanen Hortikultura	19.700.000
	TOTAL		393.200.000

4. BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp562,484,760.00 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp256.628.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 119,18% dibandingkan TA 2015.

Tabel 19
Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 September 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun)%
Belanja Modal Lainnya	562,484,760.00	256.628.000,00	119,18
Jumlah Belanja Kotor	562,484,760.00	256.628.000,00	119,18
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	562,484,760.00	256.628.000,00	119,18

Tabel 20
Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2016

No	Kegiatan	Bentuk Pengadaan	Rp
1	1771. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	Pengadaan Tas Kamera, Memory card kamera dan furniture Kantor	112.152.000
2	1774.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan Belanja Bahan kursi meja dalam rangka pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	49.950.000
3	1774.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Penyempurnaan aplikasi perencanaan program dan kegiatan hortikultura	39.800.000
4	1774.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Poli Umum	49.072.760
5	1774.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pengadaan langsung software dan perlengkapan mesin absensi	187.400.000
6	1774.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pembuatan Pagar, Gazebo, Papan nama Direktorat Jenderal Hortikultura	74.500.000
7	1774.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Pemasangan Pipa air bersih	49.610.000
	TOTAL		562.484.760

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp143.314.306,00 dan Rp1.037.132.877,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Rekening Bank	143,314,306.00	1,037,132,877.00
Uang Tunai	0.00	0.00
Jumlah	143,314,306.00	1,037,132,877.00

C.1.2 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp80.018.145,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 22

**Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jasa Giro yang belum disetor ke kas Negara	18.145.00	0.00
Perjalanan Dinas yang belum ditarik dari rekening per 31 Desember 2016	80.000.000.00	0.00
Jumlah	80.018.145.00	0.00

C.1.3 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN

GANTI RUGI

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.717.455.284,00 dan Rp461.502.936,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel 23

**Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

No	Wilayah	Debitur	30 Juni 2016	31 Desember 2015
1.	DKI Jakarta	Eko Mardiyanto,SE	191.732.231.00	204.323.232.00
.		Adityo Utomo, SE	55.848.600.00	50.558.700.00
		Asril Aminullah,SP	189.999.972.00	0.00
2.	Riau	Dedi, SP (PPK Rokan Hilir)	15.509.120.000	0.00
3.	Jambi	Ir.Moh.Nasrun TH (DK)	32.418.958.00	0.00
4.	Sulawesi Utara	JJ. Palendeng, SP,M.Si	0.00	50.000.00

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

No	Wilayah	Debitur	30 Juni 2016	31 Desember 2015
5.	Sulawesi Selatan	Ir. H.Suaib,P,MP	0.00	2.250.000.00
		Muhammad Irfan,S.Pt, M.AP (Jeneponto)	11.186.250.00	0.00
6.	Sulawesi Tenggara	Hery Sutanto,SPt,M.Si (Konawe Selatan)	50.228.830.00	0.00
		Ir.Hj.Rosdiana (DK)	23.850.000	0.00
7.	Maluku	Petronela Gaspersz,SP (DK)	150.381.550.00	0.00
8.	Nusa Tenggara Barat	A.Taufik Irfan	0.00	7.231.320.00
9.	Papua	Endah Lestari,SP	5.890.909.00	14.590.904.00
10.	Bengkulu	Ir. Oni Aryani, M.Si	4.775.000.00	0.00
		Ir Abdullah Sani	13.803.159.00	25.390.500.00
11.	Maluku Utara	Jabir Ibrahim (DK)	80.489.182.00	0.00
		Lidia Ferial Alhadar,SP (TP)	8.670.500.00	0.00
12.	Banten	H.Asep Mulya Hidayat (TP)	414.236.128.00	0.00
13.	Bangka Belitung	Emilda,S.TP	0.00	2.964.000.00
14.	Gorontalo	Ir.Nurlela N Musa,MM (PPK 2015) & Ir. Nurbaya A.Gani (PPK 2016)/(DK)	36.985.675.00	0.00
		Ir.Nurlela N Musa,MM (PPK 2015) & Ir. Nurbaya A.Gani (PPK 2016)/(TP)	182.488.410.00	0.00
15.	Kepulauan Riau	-	0.00	3,340,000.00
16.	Papua Barat	Albert Numberi,SP (Kota Sorong)	101.280.810.00	154,144,780.00
		Demas Felle,SP (DK)	147.680.000	0.00
Jumlah			1.717.455.284,00	461.502.936,00

C.1.4 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-843.187.765,00 dan Rp-461.477.936,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 24

**Perbandingan Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0.00	0.5%	0.00
Kurang Lancar	971.408.353.00	10%	97.140.834.00
Diragukan	0.00	50%	0.00
Macet	746.046.931.00	100%	746.046.931.00

C.1.5 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar 2.130.751.711,00 dan Rp110.274.431.658,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Penambahan/ Pengurangan
117111 Barang Konsumsi	1.494.444.370	1.534.880.383	40.436.013
117113 Bahan untuk Pemeliharaan	3.109.400	29.087.613	26.053.213
117114 Suku Cadang	568.340.893	0	-568.340.893
117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4.893.902.340	0	-4.893.902.340
117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	28.721.381.175	0	-28.721.381.175
117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	38.831.780.320	0	-38.831.780.320
117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	284.010.000	0	-284.010.000
117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	6.787.618.700	0	-6.787.618.700
117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	10.515.082.160	0	-10.515.082.160
117128 Barang Lainnya Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	17.685.227.500	0	-17.685.227.500
117131 Bahan Baku	158.846.659	263.638.500	104.791.841
117199 Persediaan Lainnya	330.688.141	303.145.215	--27.542.926
TOTAL	110.274.431.658	2.130.751.711	-108.143.679.947

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp48,165,030,000.00 dan Rp48,165,030,000.00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 25.125 m² senilai Rp48,165,030,000.00, mutasi tambah seluas 0 m² senilai Rp 00.00 dan mutasi kurang seluas 0 m² senilai Rp 00.00. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 26
Rincian Aset Tetap Tanah
per 31 Desember 2015

No.	No. Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Harga Per (m ²)	Nilai (Rp.)
1	Hak Pakai No. 427	Jl. AUP No. 3	10.573	2.380.000,-	25.163.740.000,-
2	Hak Pakai No. 429	Jl. Ragunan No. 19	5.339	2.410.000,-	12.866.990.000,-
3	Hak Pakai No. 181	Jl. Jagakarsa Raya No. 1	9.213	1.100.000,-	10.134.300.000,-
TOTAL			25.125		48.165.030.000,-

Tidak terdapat mutasi aset tanah pada tahun berjalan 2015, rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Mutasi Aset Tetap Tanah
per 31 Desember 2015

A. Saldo Awal	48.165.030.000.00
B. Mutasi Tambah	0.00
C. Mutasi Kurang	0.00
D. Saldo Akhir	48.165.030.000.00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp227.923.134.125,00 dan Rp193.618.853.826,00.

Tabel 28

Berikut rincian Mutasi Peralatan dan Mesin:

A. Saldo Awal	193.618.853.826
B. Mutasi Tambah	45.559.261.499
Pembelian	2.944.975.510
Transfer Masuk	41.613.595.989
Reklasifikasi Masuk	964.045.000
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	36.645.000
C. Mutasi Kurang	-7.891.698.178
Penghapusan	-18.300.000
Transfer Keluar	-206.870.000
Hibah (Keluar)	-211.500.000
Reklasifikasi Keluar	-964.045.000
Koreksi Pencatatan	-49.747.500
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-9.804.518.700
D. Saldo Akhir	227.923.134.125

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp73.330.604.000,00 dan Rp60.048.503.807,00.

Tabel 29

Berikut rincian Mutasi Gedung dan Bangunan:

A. Saldo Awal	60.048.503.807
B. Mutasi Tambah	13.850.302.730
Pembelian	21.700.000
Transfer Masuk	13.046.236.730
Pengembangan Nilai Aset	782.366.000
C. Mutasi Kurang	-568.202.537
Hibah (Keluar)	-138.789.537
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-429.413.000
D. Saldo Akhir	73.330.604.000

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp38.837.411.173,00 dan Rp39.838.824.256,00.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Mutasi Jalan, irigasi dan Jaringan

A. Saldo Awal	39.838.824.256
B. Mutasi Tambah	2.566.096.417
Transfer Masuk	2.386.596.417
Pengembangan Nilai Aset	179.500.000
C. Mutasi Kurang	- 3.567.509.500
Penghapusan	-55.912.500
Transfer Keluar	-2.287.302.000
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-1.224.295.000
D. Saldo Akhir	38.837.411.173

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.412.909.607,00 dan Rp3.416.583.607,00.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

5. Aset Tetap dalam Renovasi

Nilai Aset Tetap dalam Renovasi pada Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.2.572.000.000 dan Rp.2.572.000.000 .

2. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.1.864.211.032 dan Rp.1.983.915.007

Tabel 31
Rincian Mutasi Aset tetap Lainnya

A. Saldo Awal	3.416.583.607
B. Mutasi Tambah	11.576.000
Transfer Masuk	11.576.000
C. Mutasi Kurang	-15.250.000
Penghapusan	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-15.250.000
D. Saldo Akhir	3.412.909.607

C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp49.170.000,00 dan Rp49.170.000,00.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan

A. Saldo Awal	49.170.000
B. Mutasi Tambah	0
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	49.170.000

C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-227.265.195.172,00 dan Rp-172.377.132.933,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	48.165.030.000,00	0,00	48.165.030.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	227.923.134.125,00	-199.155.094.109,00	28.768.040.016,00
3.	Gedung dan Bangunan	73.330.604.000,00	-13.022.603.556,00	60.308.000.444,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.837.411.173,00	-11.069.154.810,00	27.768.256.363,00
5.	Aset Tetap Lainnya	3.412.909.607,00	0,00	3.412.909.607,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	49.170.000,00	0,00	49.170.000,00
Akumulasi Penyusutan		391.669.088.905,00	-223.246.852.475,00	168.471.406.430,00

C.3 PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1 PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI

RUGI

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp125.868.809,00 dan Rp0,00. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No	Wilayah	Nama	30 Desember 2016	31 Desember 2015
1.	Jawa Barat	Eka (Purwakarta)	55.387.087.00	0.00
2.	Sulawesi Selatan	Ir.Hj.Firiani,MP (DK)	16.183.545.00	0.00
		Ir.Hj.Firiani,MP (TP)	54.298.177.00	0.00
Jumlah			125.868.809,00	0,00

C.3.2 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-629.344,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Perbandingan Penyisihan Piutang TP/TGR
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	125.868.809,00	0,5%	629.343,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.4 ASET LAINNYA

C.4.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.104.733.359,00 dan Rp661.048.939,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 36
Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	1.650.000,00
Software	1.103.083.359,00
Jumlah	1.104.733.359,00

C.4.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp16.110.284.528,00 dan Rp4.758.979.828,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Hortikultura serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-14.658.654.917,00 dan Rp-4.114.073.206,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4.4 AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD (SOFTWARE)

Nilai saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Software) yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp -478.777.109,00 dan Rp 0,00.

Tabel 37

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	1.104.733.359,00	478.777.109,00	625.956.250,00
2.	Aset Lain-lain	16.110.284.528,00	14.179.877.808,00	1.930.406.720,00
	Akumulasi Penyusutan	17.215.017.887,00	14.658.654.917,00	2.556.362.970,00

C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp80.000.000,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Hortikultura per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	80.000.000,00	0,00
Jumlah	80.000.000,00	0,00

C.5.2 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp143.314.306,00 dan Rp1.037.132.877,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6 EKUITAS

C.6.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp174.158.046.240,00 dan Rp284.340.244.782,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.117.564.874,00 dan Rp3.039.423.708,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 39
Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	52.395.614,00	-100,00
Pendapatan Bunga Lainnya	0,00	54.217,00	-100,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	393.280.318,00	-100,00
Pendapatan Hak dan Perijinan	0,00	641.160,00	-100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	11.566.160,00	-100,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	4.757.504,00	-100,00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	0,00	84.258.035,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	3.117.564.874,00	2.216.624.450,00	40,65
Pendapatan Penjualan Lainnya	0,00	1.481.440,00	-100,00

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	0,00	248.305.335,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	26.059.475,00	-100,00
Pendapatan dari Penutupan Rekening	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.117.564.874,00	3.039.423.708,00	2,57

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp24.415.724.360,00 dan Rp22.882.929.757,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 40
Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	18.152.956.340,00	16.333.205.780,00	11,14
Beban Pembulatan Gaji PNS	239.543,00	-531.847,00	- 145,04
Beban Tunj. Anak PNS	362.328.556,00	350.920.726,00	3,25
Beban Tunj. Beras PNS	971.369.460,00	987.540.720,00	-1,64
Beban Tunj. Fungsional PNS	172.255.000,00	173.225.000,00	-0,56
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0,00	38.651.700,00	- 100,00

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Tunj. PPh PNS	268.200.427,00	428.033.574,00	-37,34
Beban Tunj. Struktural PNS	982.160.000,00	1.073.995.000,00	-8,55
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.259.450.034,00	1.237.897.104,00	1,74
Beban Tunjangan Umum PNS	678.505.000,00	638.490.000,00	6,27
Beban Uang Makan PNS	1.568.260.000,00	1.621.502.000,00	-3,28
Jumlah	24.415.724.360,00	22.882.929.757,00	6,70

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11.458.707.042,00 dan Rp20.935.051.096,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Persediaan amunisi	0,00	90.671.000,00	-100,00
Beban Persediaan bahan baku	0,00	6.178.293.459,00	-100,00
Beban Persediaan konsumsi	11.458.707.042,00	11.869.768.976,00	-3,46
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0,00	329.000,00	-100,00
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0,00	2.950.000,00	-100,00
Beban persediaan lainnya	0,00	2.793.038.661,00	-100,00
Jumlah	11.458.707.042,00	20.935.051.096,00	-45,27

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp112.417.287.369,00 dan Rp147.567.655.205,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.816.400,00	2.068.000,00	36,19
Beban Bahan	33.664.785.117,00	79.762.607.493,00	-57,79
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.548.800.332,00	7.465.253.680,00	-25,67
Beban Barang Operasional Lainnya	244.106.000,00	313.762.000,00	-22,20
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16.631.925.900,00	15.195.930.333,00	9,45
Beban Honor Output Kegiatan	31.779.240.000,00	22.064.161.000,00	44,03
Beban Jasa Konsultan	36.068.000,00	102.600.000,00	-64,85
Beban Jasa Lainnya	7.492.041.342,00	6.952.030.872,00	7,77
Beban Jasa Pos dan Giro	39.300.180,00	25.466.200,00	54,32
Beban Jasa Profesi	6.964.710.000,00	6.374.150.000,00	9,27
Beban Keperluan Perkantoran	3.953.210.200,00	3.497.818.425,00	13,02
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	100.000.000,00	7.060.000,00	1.316,43
Beban Langganan Listrik	1.125.146.542,00	1.074.250.406,00	4,74
Beban Langganan Telepon	165.320.057,00	209.402.120,00	-21,05
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	83.346.369,00	97.658.000,00	73,37

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	95.147.030,00	81.903.676,00	16,17
Beban Sewa	4.492.197.900,00	4.341.533.000,00	3,47
Jumlah	112.417.287.369,00	147.567.655.205,00	-23,76

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.249.848.809,00 dan Rp4.416.888.966,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.385.983.000,00	1.867.119.125,00	-25,77
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14.950.000,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.904.526.596,00	1.831.255.221,00	4,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.373.600,00	164.416.000,00	-27,40
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	243.194.900,00	169.008.900,00	43,85
Beban Persediaan suku cadang	581.820.713,00	385.089.720,00	51,09
Jumlah	4.249.848.809,00	4.416.888.966,00	-3,78

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp140.937.288.858,00 dan Rp144.128.811.685,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	75.210.901.574,00	67.921.713.355,00	10,73
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.990.696.800,00	11.237.273.950,00	24,50
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.327.391.700,00	21.806.867.400,00	- 43,47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39.118.588.613,00	42.513.954.368,00	-7,99
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	237.510.171,00	649.002.612,00	- 63,40
Beban Perjalanan Tetap	52.200.000,00	0,00	0,00
Jumlah	140.937.288.858,00	144.128.811.685,00	-2,21

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp766.967.783.639,00 dan Rp570.150.874.802,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	238.717.551.392,00	167.344.963.754,00	42,65
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	376.584.210.416,00	243.365.695.637,00	54,74
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	2.061.530.941,00	-100,00
Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	00,00
Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.836.835.200,00	41.033.932.333,00	-95,52
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	134.254.917.799,00	102.245.263.495,00	31,31
Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	15.574.268.832,00	14.099.488.642,00	10,46
Jumlah	766.967.783.639,00	570.150.874.802,00	34,52

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp14.352.470.415,00 dan Rp17.142.384.305,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Software	100.033.198,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.346.849.726,00	1.147.870.983,00	17,33
Beban Penyusutan Irigasi	521.153.852,00	553.300.878,00	-5,81
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	63.397.621,00	118.017.642,00	-46,28
Beban Penyusutan Jaringan	789.947.146,00	681.334.331,00	15,94
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	58.975.719,00	41.106.600,00	43,47
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.472.113.153,00	14.600.753.871,00	-21,43
Jumlah	14.352.470.415,00	17.142.384.305,00	-16,27

D.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp446.153.137,00 dan Rp229.719.040,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	229.719.040,00	-100,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	445.523.793,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	629.344,00	0,00	0,00
Jumlah	446.153.137,00	229.719.040,00	94,22

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 48
Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-189.219.729,00	-1.828.600.219,00	-89,65
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-2.861.090.765,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	2.389.000.094,00	620.296.750,00	285,14
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	120.779.287,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	5.191.132.587,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	4.000.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	110.035.203,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.505.574.105,00	68.229.138,00	2.106,64
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.138.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	27.850.000,00	8.891.800,00	213,21
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	133.849.800,00	73.777.590,00	81,42
Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.081.818,00	0,00	0,00
Jumlah	6.432.992.400,00	-1.041.266.941,00	-717,8

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp284.340.244.782,00 dan Rp284.340.244.782,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp-1.065.694.706.355,00 dan Rp-925.456.158.089,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN

MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-5.137.067.764,00 dan Rp-20.002.362.871,00.

E.4.1 KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-54.690.045,00 dan Rp-18.223.098.381,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4.2 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-5.163.988.219,00 dan Rp25.950.600,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.3 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp81.610.500,00 dan Rp0,00.

E.4.4 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-1.805.215.090,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp960.649.575.577,00 dan Rp984.165.603.230,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 49

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	954.270.749.318,00
Diterima dari Entitas Lain	-5.909.391.870,00
Transfer Keluar	-2.036.191.276,00
Transfer Masuk	14.324.409.405,00
Jumlah	960.649.575.577,00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp174.158.046.240,00 dan Rp284.340.244.782,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak Terjadi kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Terdapat akun Pendapatan Anggaran Lain-lain (423999) senilai Rp.61.895, yaitu:

Tabel 50

Penjelasan Akun Pendapatan Anggaran Lain-lain (423999)

Kode Satker	Nama satker	Nilai	Penjelasan
039042	Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Semarang	1.000	Terdapat kesalahan penyetoran pengembalian belanja atas realisasi akun 526xxx, sehingga oleh KPPN Setempat dialihkan menjadi akun 423999
110845	Dinas pertanian kab. Ogan komering ilir	60.895	Terdapat Kelebihan dalam penyeteroan sisa UP, sehingga dengan surat pernyataan dari satker dilakukan koreksi dan dialihkan oleh KPPN ke akun 423999 tanpa mengubah setoran sisa UP sebelumnya

2. Terdapat satu satuan kerja yang memiliki Realisasi Belanja Tanpa Pagu, yaitu Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Majene (018.04.340118) senilai Rp.-4.000.000. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan dalam pengajuan Kode Output ke KPPN dan terlambat melakukan revisi di Tahun anggaran 2016.
3. Satker in aktif membawa aset pada tahun 2016 sebanyak 101 satker. Sebanyak 4 satker in aktif berasal dari satker aktif pada tahun 2016 yang berubah kode satker, yaitu :
 - a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan (419019)
 - b. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato (419025)
 - c. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo (419026)
 - d. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Majene (340117)
4. Satker yang berubah kode satker sebanyak 10 satker yang terdiri atas :
 - a. Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Kudus (419018)

- b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan (419019)
 - c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Bone (419020)
 - d. Dinas Pertanian Kabupaten Maros (419021)
 - e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Sinjai (419022)
 - f. Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Takalar (419023)
 - g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Manggarai (419024)
 - h. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato (419025)
 - i. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo (419026)
 - j. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Majene (340118)
5. Satker yang menerima limpahan aset eks Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) sebanyak 56 Satker. (nama satker dan jumlah aset terlampir).
 6. Kesepakatan Nilai Laporan Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura TA.2016 berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi dengan BPK RI .(Lampiran 7)
 7. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura TA.2016 terdapat pada Pemeriksaan Tahap I, II dan IV.(Lampiran 4)
 8. Terdapat transaksi yang salah pada transaksi pembelian, dimana hal itu terjadi atas rekomendasi Staf Kementerian Keuangan yang menangani aplikasi karena untuk menyiasati aplikasi SIMAK (update 16.0) yang tidak mau menerima file kirim ke SAIBA sehingga harus disiasati dengan menambah transaksi pembelian setelah itu harus dihilangkan. Namun satker lupa menghilangkan, sehingga muncul transaksi pembelian pada satker :
 - a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Sumenep (059046) senilai Rp. 1
 - b. Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara (280151) senilai Rp.100
- Dan sudah diperbaiki pada laporan Barang Milik Negara Audeted tahun 2016.

9. Satker yang telah melakukan penghapusan Barang Milik Negara dan telah dikeluarkan dari neraca sebanyak 2 satker yaitu :
 - a. Direktorat Jenderal Hortikultura (625875) senilai Rp.104.404.975
 - b. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang (290429) senilai Rp.18.300.000.
 - c. Dinas Pertanian Kabupaten Rembang (031343) senilai Rp.49.747.500, terjadi kesalahan input, seharusnya diinput pada transaksi koreksi karena SK dan BAST penghapusan menggunakan Satker in aktif PPHP dan telah diperbaiki.

10. Satker yang telah melakukan proses hibah dan telah dikeluarkan dari neraca aplikasi SIMAK BMN sebanyak 1 satker yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan (159000) senilai Rp.350.289.537

11. Satker yang telah berubah kode satker dan telah melakukan reklas keluar pada kode satker lama sebanyak 1 satker yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan (419019) senilai Rp.74.745.000.

12. Belanja Akun 526xxx pada semester I tahun 2016 masih tersisa pada saldo akhir senilai Rp.0 dengan saldo awal per tanggal 1 januari 2016 senilai Rp.107.719.002.195 dan realisasi pada tahun anggaran tahun 2016 senilai Rp.764.942.969.889, sedangkan yang telah dibuatkan BAST sesuai dengan PMK 248/PMK.07/2010 pada tahun 2016 senilai Rp.813.980.861.983 dan senilai Rp.38.681.110.101 telah dibuatkan BAST ke kelompok Tani.

13. Progres Tindak Lanjut Temuan BPK RI TA 2016 atas satuan kerja inaktif Lingkup Ditjen Hortikultura senilai Rp 11.388.848.243,00 dengan rincian terlampir.